

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini pertumbuhan perekonomian Indonesia sedang terguncang karena kehadiran Covid-19 khususnya memasuki akhir dari Triwulan I di tahun 2020. Hal ini menjadikan fenomena yang sangat mengkhawatirkan bagi seluruh umat manusia di dunia (Darma dkk, 2020). Kehadiran Covid-19 ini membuat Indonesia terus menerus membangun ekonominya untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera. Sebuah tantangan baru bagi Indonesia dengan kehadiran pandemi Covid-19 dengan level krisis belum pernah terjadi sebelumnya. Covid-19 ini membawa dampak yang sangat serius terhadap perekonomian Indonesia. Perekonomian yang semakin melemah berdampak kepada rumah tangga, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, dan sektor keuangan. Bagi sektor usaha, salah satu dampak bagi UMKM adalah tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban kredit (Kementrian Keuangan, 2021).

Banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 di bidang ekonomi. Tetapi yang terkena dampak yang lebih besar adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dikarenakan UMKM memiliki peran penting dan merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang sangat dibutuhkan keberadaannya. Dukungan pemerintah untuk UMKM di masa pandemi covid-19 adalah dengan membuat kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Hernikawati, 2022). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 PEN merupakan bentuk respon kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam upaya untuk menjaga dan mencegah aktivitas usaha dari pemburukan lebih lanjut, mengurangi semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja dengan memberikan subsidi bunga kredit bagi debitur usaha mikro kecil, dan menengah yang

terdampak, mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta untuk mendukung kebijakan keuangan negara.

Salah satu program yang diluncurkan pemerintah sejak tahun 2007 adalah Kredit Usaha Rakyat. Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini nantinya akan menjembatani akses UMKM terhadap layanan pembiayaan. KUR memberikan persyaratan yang relatif mudah serta bunga yang relatif rendah sehingga menjadikan KUR sebagai primadona sumber pendanaan bagi sektor UMKM. Maka dari itu, tidak heran dari tahun ke tahun realisasi penyaluran KUR terus mengalami peningkatan (Mawesti, 2020). Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro Kecil dan Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fasilitas yang disediakan pemerintah Indonesia untuk memperpanjang nafas sektor riil termasuk UMKM adalah melalui kebijakan restrukturisasi kredit perbankan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 11/POJK.03/2020. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan terutama untuk menekankan angka kredit bermasalah. Aturan ini memberi ruang pada bank melakukan relaksasi kredit terhadap debitur yang kesulitan mengembalikan pinjaman karena usaha nya terkena pandemi (Mawesti, 2020).

Agar pemberian kredit tersebut berlangsung secara efektif dan efisien, diperlukan adanya sistem informasi akuntansi pemberian kredit yang akan mengatur mekanisme pemberian kredit kepada nasabah/debitur. Sistem informasi pemberian kredit memegang peranan penting untuk mencegah terjadinya pemberian kredit yang tidak sehat (Winduri dan Sulistyono, 2016). Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan

sumber daya yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan dan data-data lainnya menjadi informasi. Informasi yang dihasilkan akan digunakan dalam berbagai bentuk untuk kepentingan pengambilan keputusan (Bodnar dan Hopwood, 2012). Sedangkan menurut Wilkinson (2000) sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang mencakup semua fungsi dan aktivitas akuntansi yang memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan pada sumber daya ekonomi dari kejadian eksternal ataupun operasi di internal organisasi.

Dengan adanya suatu sistem informasi akuntansi pemberian kredit yang baik, diharapkan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Kantor Cabang Panyabungan memperoleh kepercayaan penuh dari para nasabahnya, sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Kantor Cabang Panyabungan lebih leluasa dalam mendukung pencapaian usaha-usaha para nasabahnya. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik dan ingin memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai tata cara peminjaman atau pemberian kredit agar hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya tidak terjadi. Penulis tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA KANTOR CABANG PANYABUNGAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan yang diterapkan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Kantor Cabang Panyabungan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)?
2. Bagaimana sistem pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Kantor Cabang Panyabungan?
3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Kantor Cabang Panyabungan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan pemberian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Kantor Cabang Panyabungan.
2. Untuk mengetahui sistem pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Kantor Cabang Panyabungan.
3. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Kantor Cabang Panyabungan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk menambah pengetahuan baru dan wawasan penulis di bidang perkreditan terutama di bidang sistem pemberian dan pengawasan kredit.
 - b. Memberikan pengalaman dalam mempraktikkan ilmu dan teori Akuntansi yang diperoleh selama mengikuti program kuliah di Program Diploma III Jurusan Akuntansi ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Bagi instansi
 - a. Bagi program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Sebagai referensi dan dapat dijadikan literatur bagi mahasiswa yang akan mengambil permasalahan yang sama.
 - b. Bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Kantor Cabang Panyabungan
Sebagai masukan dan pertimbangan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Kantor Cabang Panyabungan khususnya mengenai Prosedur dan pengawasan pemberian kredit.

1.5 Tempat dan Waktu magang

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Kantor Cabang Panyabungan yang beralamatkan di Jl. Willem

Iskandar No 114, Sipolu polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara 22778. Pelaksanaan magang berlangsung selama 40 hari kerja. Mulai tanggal 02 Januari- 28 Februari 2023.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan laporan ini dikelompokkan atas :

BAB I:Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan

BAB II :Landasan Teori

Bab ini berisikan tinjauan teoritis yang memuat teori-teori yang didapatkan semasa kuliah dan buku-buku pedoman lainnya yang relevan dengan judul yang diangkat.

BAB III : Gambaran umum perusahaan

Bab ini berisikan gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah umum perusahaan, visi dan misi, logo dan makna, struktur organisasi, *job description*.

BAB IV:Pembahasan

Bab ini membahas mengenai kebijakan, sistem akuntansi pemberian, dan pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Kantor Cabang Panyabungan.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran tentang Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Kantor Cabang Panyabungan.